Pajak dan Manajemen Keuangan
Volume. 2, Nomor. 4 Agustus 2025
e-ISSN : 3046-9848; p-ISSN : 3046-899X; Hal. 64-73
DOI: https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v2i3.1268
Available online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/PAJAMKEU

Dampak Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Daya Beli Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2025

Ahmad Wahyudi Zein[1*], Ahmad Al Farabi[2], Fahreza Permana[3]
[1-3] Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email : ahmadwahyudizein@gmail.com [1]

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235
Korespondensi penulis : ahmadwahyudizein@gmail.com *

Abstract. *This study aims to analyze the impact of layoffs (PHK) on the decline in people's purchasing power and Indonesia's economic growth in 2025. Layoffs are predicted to increase due to various factors such as tax hikes, subsidy restrictions, and decreased purchasing power. The study uses a quantitative method with secondary data from BPJS Ketenagakerjaan, Bank Indonesia, and other relevant institutions, as well as consumer survey data to measure the decline in purchasing power. The results show that layoffs significantly reduce people's purchasing power, which in turn negatively affects household consumption and national economic growth. The MSME and informal sectors are also affected by this decline in purchasing power. The study recommends policies that support industries prone to layoffs, revise layoff requirements, and maintain macroeconomic stability to prevent mass layoffs and minimize their impact on Indonesia's economy.*

Keywords: *Termination of Employment (PHK), Economic growth*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap penurunan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025. PHK diprediksi meningkat akibat berbagai faktor seperti kenaikan pajak, pembatasan subsidi, dan penurunan daya beli. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dari BPJS Ketenagakerjaan, Bank Indonesia, dan lembaga terkait lainnya, serta data survei konsumsi masyarakat untuk mengukur penurunan daya beli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PHK signifikan menurunkan daya beli masyarakat, yang selanjutnya berdampak negatif pada konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor UMKM dan informal juga terkena dampak dari penurunan daya beli ini. Penelitian ini merekomendasikan kebijakan yang mendukung sektor industri yang berpotensi PHK, merevisi persyaratan PHK, serta menjaga stabilitas ekonomi makro untuk mencegah PHK massal dan meminimalkan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.

Kata kunci: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Pertumbuhan ekonomi

1. LATAR BELAKANG

Pada tahun 2025, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang cukup berat. Salah satunya adalah maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor industri. PHK yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain tekanan ekonomi global, perubahan pola konsumsi, dan ketidakpastian pasar, telah memaksa banyak perusahaan untuk mengurangi jumlah karyawannya agar tetap bertahan. Maraknya PHK tersebut menyebabkan banyak pekerja kehilangan pendapatan tetapnya. Akibatnya, penurunan pendapatan tersebut berdampak pada penurunan pengeluaran sehari-hari yang juga berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli ini berdampak signifikan terhadap konsumsi domestik yang menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sangat bergantung pada konsumsi masyarakat juga mengalami penurunan pendapatan. Hal ini menyebabkan UMKM sulit untuk

Received: Mei 31, 2025; Revised: Juni 14, 2025; Accepted: Juni 28, 2025; Published: Juni 30, 2025

berkembang bahkan bertahan hidup, sehingga menurunkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dampak PHK tidak hanya dirasakan oleh individu maupun UMKM, tetapi juga perekonomian nasional. Seperti yang terlihat dari data resmi pemerintah, penurunan konsumsi masyarakat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Situasi ini menjadi perhatian besar bagi para pembuat kebijakan, karena perlambatan pertumbuhan ekonomi dapat memperburuk situasi sosial dan ekonomi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan analisis mendalam tentang bagaimana PHK memengaruhi daya beli masyarakat dan bagaimana penurunan daya beli akan berkontribusi pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025. Selanjutnya, kami akan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang melatarbelakangi PHK dan mengusulkan solusi untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap perekonomian.

2. KAJIAN TEORITIS

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

PHK didefinisikan sebagai berakhirnya hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja karena alasan tertentu (UU No. 13 Tahun 2003). Dalam praktiknya, PHK dipicu oleh faktor internal perusahaan (seperti efisiensi atau kebangkrutan) maupun eksternal (seperti pelemahan ekonomi global dan turunnya permintaan). Fenomena PHK massal menyebabkan meningkatnya pengangguran dan penurunan pendapatan rumah tangga, yang berdampak pada kontraksi konsumsi masyarakat.

Daya Beli Masyarakat

Daya beli mencerminkan kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa berdasarkan pendapatan yang dimiliki. Dalam teori Keynesian, konsumsi rumah tangga merupakan komponen utama dalam menentukan output nasional. Ketika pendapatan menurun akibat PHK, maka konsumsi pun menurun, sehingga memicu penurunan dalam pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar dan Solow, investasi, tabungan, serta tenaga kerja yang produktif adalah penentu utama pertumbuhan jangka panjang. Namun, jika terjadi gelombang PHK, maka konsumsi dan investasi cenderung turun karena ketidakpastian ekonomi meningkat, yang menghambat pertumbuhan.

Hubungan antara PHK, Daya Beli, dan Pertumbuhan Ekonomi

PHK menyebabkan hilangnya pendapatan dan menurunnya daya beli, yang berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga—komponen terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam jangka pendek, hal ini menciptakan efek domino terhadap sektor UMKM dan perbankan. Dalam jangka panjang, dapat menciptakan stagnasi ekonomi jika tidak diintervensi dengan kebijakan yang tepat.

Pendekatan Sosial Ekonomi

Dari perspektif sosiologi ekonomi, PHK massal dapat memperluas jurang ketimpangan, meningkatkan kemiskinan, dan mendorong gejolak sosial. Teori ketergantungan menyoroti kerentanan negara-negara berkembang terhadap guncangan eksternal, seperti krisis global yang memicu PHK di sektor ekspor. Selain itu, pendekatan pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya kebijakan yang menjaga stabilitas ketenagakerjaan untuk mencegah kemunduran sosial

3. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan pendekatan kajian pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna dari kondisi yang diteliti dan memerlukan analisis penelitian yang mendalam. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan berbagai publikasi dari jurnal dan pencarian di internet untuk memperoleh informasi berdasarkan referensi, ulasan, artikel, atau peraturan perundang-undangan daring yang terkait dengan pokok bahasan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dampak yang ditimbulkan akibat pemutusan hubungan kerja yang terjadi di Indonesia, yang akan dikaitkan dengan menurunnya daya beli dan pertumbuhan ekonomi, yang merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta pengaruhnya terhadap perekonomian Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merujuk pada terminasi hubungan kerja karena alasan tertentu yang menyebabkan berakhirnya segala hak dan tanggung jawab antara pekerja dan perusahaan/majikan. Penyebab PHK bisanya berupa pengunduran diri, pemecatan oleh perusahaan, atau berakhirnya kontrak. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PHK diartikan

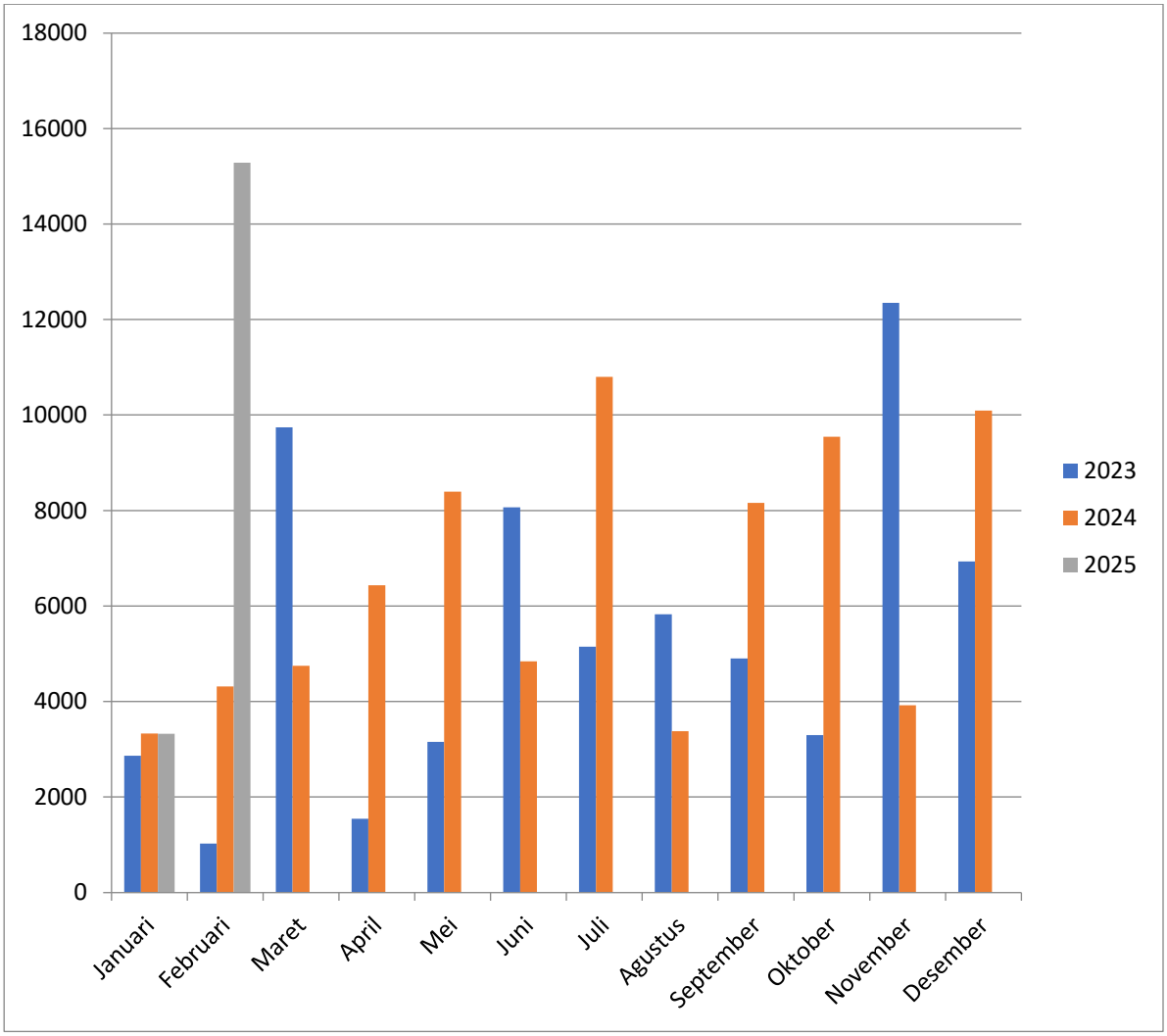
sebagai pengakhiran hubungan kerja karena alasan tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha.

Berdasarkan laporan analisis Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial, diperkirakan sebanyak 280.000 pekerja di sektor tekstil akan mengalami PHK sepanjang 2025.Pada kuartal pertama 2025, beberapa perusahaan lain juga telah melakukan PHK massal, termasuk Yamaha, KFC, dan Sanken.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi masalah krusial bidang ketenagakerjaan. Maraknya PHK massal terjadi sejak pandemi Covid-19 hingga saat ini. Data PHK selama sepuluh tahun terakhir yaitu sekitar 77.700 orang (2014), 48.800 orang (2015), 12.800 orang(2016), 9.800 orang (2017), 3.400 orang (2018), 45.000 orang (2019), 3.600.000 orang (hingga Juli 2020), 538.305 orang (hingga Agustus 2021), 25.114 orang (2022), 26.400 orang (hingga Juli 2023), dan 80.000 orang (2024) (Angka PHK di Indonesia, 2021"; "Kemnaker: Hingga Awal Agustus, 2021"; Kemnaker, 2023). Data tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 2014 terjadi PHK dengan jumlah yang cukup besar tetapi jumlah tersebut berangsur turun hingga tahun 2018. Selanjutnya, jumlah PHK kembali melonjak saat terjadi pandemi Covid-19 dan puncaknya terjadi pada tahun 2020. Kemudian setelah pandemi, jumlah PHK berangsur turun hingga tahun 2023 tetapi kembali meningkat pada tahun 2024.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, pada Januari-Februari 2025, ada 18.610 pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini meningkat drastis dengan periode yang sama pada 2023 dan 2024 yang masing-masing sebanyak 3.892 orang dan 7.649 orang. Yang dimana disebabakan oleh dua faktor, yaitu:

1.) Faktor Domestik: Pelemahan daya beli masyarakat, banjir produk Impor
2.) Faktor eksternal: Perlambatan ekonomi negara-negara tujuan utama ekspor Indonesia



Tabel 1. Jumlah Pekerja Terkena PHK (perbulan)

Jumlah pekerja terkena PHK pada Februari 2025 menjadi rekor pemutusan hubungan kerja terbanyak dalam dua tahun terakhir. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat setidaknya ada 15.285 pekerja yang kontraknya diputus pada Februari 2025. Rekor jumlah pekerja terkena PHK dalam sebulan terbanyak sebelumnya terjadi pada November 2023, yang mencapai 12.347 orang.

Berdasarkan analisis Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat tujuh penyebab utama terjadinya PHK, yaitu kerugian atau penutupan perusahaan akibat penurunan permintaan domestik dan ekspor, relokasi pabrik untuk efisiensi biaya upah, konflik hubungan industrial, aksi mogok kerja, efisiensi perusahaan, transformasi bisnis, serta kebangkrutan karena kewajiban kepada kreditur. Fenomena peningkatan PHK ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat secara signifikan, karena banyak pekerja kehilangan sumber pendapatan.

Penurunan daya beli ini pada gilirannya dapat menekan konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Dampak PHK Terhadap Penurunan Daya Beli dan Pertumbuhan Ekonomi

Dampak dari meningkatnya PHK juga dirasakan di sektor properti dan perbankan. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan mulai kesulitan membayar cicilan rumah dan pinjaman lainnya setiap bulan. Kondisi ini dapat menyebabkan krisis kredit yang lebih luas jika pemerintah dan sektor perbankan tidak segera mengatasi masalah ini.

Dampak PHK massal ini langsung terasa pada daya beli. Indeks Penjualan Riil (IPR) yang dipublikasikan Bank Indonesia mencatat penurunan tahunan sebesar 0,5% pada Februari 2025, yang mengindikasikan melemahnya konsumsi rumah tangga. Penurunan ini diperparah oleh lemahnya belanja pemerintah selama Ramadan dan Idul Fitri, dengan tambahan produk domestik bruto (PDB) hanya mencapai Rp140,74 triliun, turun 16,5% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kelas menengah yang selama ini menjadi penopang konsumsi domestik kini berada dalam situasi yang rentan. Pada Februari 2025, rata-rata gaji pekerja per bulan hanya Rp3,09 juta, naik tipis 1,78% dibanding tahun sebelumnya. Namun, level tersebut masih jauh di bawah biaya hidup layak di kota besar yang berada di kisaran Rp14,88 juta per bulan. Kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% dan iuran wajib seperti Tapera menambah beban pajak bagi kelompok ini. Fenomena ini menyebabkan turunnya kelas menengah di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 9,5 juta orang dari kelas menengah terdegradasi selama lima tahun terakhir. Tren ini mengancam prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang, mengingat konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh PDB nasional.

KMPE juga menyoroti lemahnya intervensi pemerintah untuk menekan angka PHK. Program bantuan sosial yang dilaksanakan dinilai masih belum cukup untuk mengatasi dampak negatif krisis ketenagakerjaan dan daya beli. Lebih lanjut, KMPE diperingatkan bahwa turunnya daya beli dapat menyebabkan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Jika konsumsi rumah tangga terus menurun, target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 5% pada tahun 2025 akan sulit tercapai. Efek domino dari penurunan daya beli ini juga tercermin pada penjualan eceran yang mengalami penurunan tajam sejak akhir tahun 2024. Pusat perbelanjaan global telah melaporkan penurunan jumlah pengunjung yang signifikan, dan beberapa department store bahkan mulai mengurangi jumlah cabang mereka untuk mengurangi biaya operasional.

Situasi ini juga berdampak serius pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Banyak yang kesulitan untuk mempertahankan operasinya karena permintaan konsumen yang

menurun, sehingga lebih memilih untuk membatasi pengeluaran mereka. KMPE mengusulkan beberapa langkah strategis untuk mengatasi situasi ini. Misalnya, mempercepat program padat karya untuk menyerap tenaga kerja, memberikan insentif kepada industri yang mempertahankan karyawannya, dan menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi dan konsumsi. Pentingnya reformasi kebijakan ekonomi yang lebih berfokus pada ketahanan nasional ditekankan. “Kita tidak bisa terus bergantung pada sektor ekspor dalam konteks global yang tidak stabil. Penguatan ekonomi nasional harus menjadi prioritas utama,” kata Reza (2025). Pemerintah harus lebih aktif mengantisipasi konsekuensi sosial dari meningkatnya kemiskinan. Jika tidak dikelola dengan baik, krisis ini dapat menyebabkan meningkatnya keresahan sosial, termasuk meningkatnya kejahatan dan ketimpangan ekonomi.

Peran Pemerintah dan Kebijakan Sosial Pemerintah dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia

Di tengah peningkatan angka pengangguran, Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 meningkat 45% pada 2025, mencapai Rp 313,5 triliun. Meskipun terjadi PHK massal, sejumlah pengamat pajak menilai dampaknya terhadap penerimaan pajak negara tidak signifikan. Hal ini karena negara tetap memperoleh potongan dari pembayaran pesangon para karyawan yang terkena PHK."Ketika ada PHK, seringkali pekerja yang terdampak adalah pekerja dengan upah minimum sehingga dampaknya terhadap penerimaan PPh 21 tidak terlalu besar. Selain itu, pembayaran pesangon juga menjadi objek PPh 21, sehingga penerimaan pajak tetap terjaga," ujar Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono, kepada Kontan, Selasa (4/3). Prianto menambahkan bahwa prediksi gelombang PHK pada 2025 masih bersifat perkiraan. Dari sisi PPh badan, penutupan perusahaan juga tidak terlalu berdampak karena sebagian besar perusahaan yang ditutup telah mengalami kerugian dalam beberapa tahun terakhir, sehingga tidak memiliki kewajiban membayar PPh badan.

Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang dapat mengatasi dampak PHK massal dan melemahnya daya beli. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat program jaminan sosial dan pelatihan ulang bagi pekerja yang terkena PHK, guna meningkatkan keterampilan dan daya saing mereka di pasar kerja. Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian insentif fiskal bagi sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, seperti industri manufaktur dan pertanian. Langkah ini diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan mengurangi angka pengangguran.

Pemerintah juga mengevaluasi kebijakan fiskal yang memberatkan kelas menengah, seperti kenaikan PPN dan iuran Tapera. Penyesuaian kebijakan ini dapat membantu meringankan

beban ekonomi yang dihadapi oleh kelompok ini dan mendorong peningkatan konsumsi domestik. Dalam jangka panjang, strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi kunci untuk memperkuat kelas menengah. Investasi dalam pendidikan, infrastruktur, dan teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Pemerintah juga perlu meningkatkan koordinasi dengan sektor swasta dan lembaga keuangan untuk menyediakan akses pembiayaan yang terjangkau bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dukungan ini dapat membantu UMKM berkembang dan menyerap tenaga kerja, sehingga mengurangi tekanan terhadap pasar tenaga kerja. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi juga menjadi faktor penting. Pemerintah harus memastikan bahwa program-program yang dirancang untuk mengatasi dampak PHK dan melemahnya daya beli tepat sasaran dan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Menjelang paruh kedua tahun 2025, KMPE memperkirakan bahwa tekanan ekonomi akan semakin parah jika tidak ada langkah-langkah mitigasi yang konkret. Dalam skenario terburuk, pertumbuhan ekonomi nasional bisa melambat hingga di bawah 4 persen, yang akan berdampak pada stabilitas keuangan negara.

Meski demikian, KMPE masih melihat peluang bagi Indonesia untuk keluar dari krisis ini jika pemerintah dan dunia usaha dapat berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Perbaikan regulasi ketenagakerjaan, peningkatan daya saing industri, serta dukungan bagi UMKM menjadi kunci utama dalam mengatasi krisis ini. Ke depan, KMPE akan terus melakukan kajian dan advokasi terhadap kebijakan ekonomi nasional untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat. Mereka juga berencana melakukan diskusi terbuka dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi tantangan ekonomi di tahun 2025.

Sementara itu, masyarakat dihimbau untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan mereka di tengah-tengah dampak ekonomi. Mengurangi utang konsumtif, meningkatkan keterampilan, dan mencari peluang usaha alternatif menjadi beberapa langkah yang disarankan oleh KMPE guna bertahan dalam situasi sulit ini. Dengan segala tantangan yang ada, tahun 2025 memang diprediksi akan menjadi tahun yang penuh ujian bagi perekonomian Indonesia. Namun, dengan strategi yang tepat dan kerja sama semua pihak, KMPE optimis bahwa Indonesia masih memiliki peluang untuk bangkit dan menghadapi krisis ini dengan lebih baik.

5. KESIMPULAN

Dampak PHK Bagi Perekonomian dan Konsumsi Masyakat

- **Pengangguran dan Penurunan Daya Beli Masyarakat**

PHK menjadi penyebab utama meningkatnya angka pengangguran dan menurunnya daya beli masyarakat. Pengangguran, terutama di kalangan terdidik, naik akibat ekspektasi kerja yang tinggi serta dampak otomatisasi industri. Penurunan daya beli ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, seperti saat pandemi Covid-19, di mana pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi karena tingginya pengangguran. Dampak jangka panjangnya juga berupa penurunan penerimaan pajak negara, yang memperburuk kondisi ekonomi nasional. Namun, kebijakan fiskal seperti insentif pajak dan subsidi upah dapat membantu menjaga daya beli masyarakat selama krisis.

- **Efek Domino terhadap Bisnis dan UMKM**

UMKM menjadi sektor yang paling terdampak saat daya beli masyarakat turun akibat PHK. Banyak pelaku usaha mikro mengalami penurunan pendapatan drastis, sehingga jumlah pekerja informal meningkat. Dalam kondisi ini, dukungan pemerintah sangat penting, misalnya melalui program pemberdayaan ekonomi. Selain itu, adopsi teknologi digital terbukti dapat membantu UMKM bertahan dan meningkatkan daya saing serta pendapatan, meskipun dalam situasi krisis.

- **Perubahan Tren Kerja dan Adaptasi Perusahaan**

Perusahaan harus beradaptasi dengan perubahan tren kerja dan strategi bisnis akibat tantangan ekonomi global. Transformasi digital menjadi solusi utama untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia. Namun, hal ini juga menimbulkan stres kerja akibat perubahan budaya organisasi. Perusahaan yang mampu mengembangkan keterampilan tenaga kerjanya akan lebih unggul dalam menghadapi tantangan bisnis. Pelatihan SDM dan inovasi pemasaran digital menjadi strategi penting untuk mempertahankan bisnis di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat.

- **Peran Pemerintah dalam Mengatasi Dampak PHK**

Pemerintah memegang peran penting dalam mengurangi dampak negatif PHK melalui kebijakan ekonomi dan sosial, seperti bantuan sosial bagi masyarakat terdampak. Namun, distribusi bantuan sering terkendala data penerima yang kurang akurat. Selain itu, pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan juga efektif untuk mengurangi pengangguran. Dukungan pemerintah terhadap UMKM terbukti berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

DAFTAR REFERENSI

Bank Indonesia. (2025). Waspadai dampak PHK terhadap penurunan daya beli masyarakat. https://ekonomi.republika.co.id/berita/svx24w370/

Ismail, T. (2023, September 25). Fenomena PHK massal di Indonesia tahun 2023: Ini penyebab dan dampaknya. Bekelsego. https://bekelsego.com/fenomena-phk-massal-di-indonesia-tahun-2023-penyebabdan-dampaknya/

Kompasiana. (2023). PHK massal 2025, daya beli melemah, kelas menengah tertekan. https://www.kompasiana.com/...

Kumparan. (2022). Badai PHK di kuartal pertama 2025: Bagaimana nasib ekonomi Indonesia. https://kumparan.com/...

Netral News. (2025). PHK dan penurunan daya beli, KMPE: 2025 jadi tahun terberat. https://www.netralnews.com/...

PE FEB UNESA. (n.d.). Dampak PHK bagi perekonomian dan konsumsi masyarakat. https://pe.feb.unesa.ac.id/...

Pramudita, M. R., Ruslina, E., Dewi, G., & Gustini, R. (2022). Resesi ekonomi dan implikasinya dari perspektif hukum dagang pasca pandemi tahun 2023. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, 1(01), 1–1.

Retnaningsih, H. (2025). Potensi pemutusan hubungan kerja. Analisis Strategis terhadap Isu Aktual, 17(1/I/PUSAKA/Januari), Komisi IX Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial.

Solihah, R. (2023). Implikasi sosial dan ekonomi dari PHK massal. Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora, 2(3), 178–192.

Tanera, L., Lie, G., & Tanera, L. (2023). Perlindungan hak karyawan PT. Karisma Klasik Indonesia Tugurejo Semarang terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK). Jurnal Ilmu Hukum, 3(4), 292–298.

Wibowo, R. F., & Herawati, R. (2021). Perlindungan bagi pekerja atas tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(1), 109–120. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.109-120